

**RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH
DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TENARU KECAMATAN
DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

Muchammad Rezal Ardiansyah
NPP. 32.0541

*Asdaf Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 32.0541@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Karolina R. S. Wenggi, M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *These are evident in the implementation of development programs that do not align with the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) as previously outlined during the village development planning forum (musrenbang) the village development planning forum (musrenbang) of Tenaru Village, Driyorejo Subdistrict, Gresik Regency, East Java Province. **Objective:** This study aims to describe the nature of the relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the village government in development efforts. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method, analyzing the relationship based on Eko Sutoro's theory of village governance. Data were collected through in-depth interviews (with 11 informants) and documentation. **Findings:** The findings indicate that the relationship between the BPD and the Village Government of Tenaru reflects a partnership model. This partnership is driven by several factors, including structured communication and coordination, shared goals in improving community welfare, and the active roles of community members and village figures. **Conclusion:** The relationship between the BPD and the Village Government in Tenaru Village is built on a spirit of partnership. Both institutions support and complement each other, where the BPD not only fulfills a supervisory role but also actively participates as a partner in open dialogue forums concerning village development. The Village Government also demonstrates openness to various forms of input and criticism, thereby fostering a working environment based on mutual trust. **Keywords:** Relationship, Village Consultative Body, Village Government, Village Development*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dilihat dari realisasi program pembangunan yang tidak sesuai dengan rancangan RPJMDes yang telah disusun dalam musrenbang Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah desa dalam pembangunan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap relasi menurut Teori Eko Sutoro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (11 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu relasi antara BPD dan Pemerintah Desa Tenaru mencerminkan pola hubungan kemitraan. Relasi kemitraan terbangun karena faktor pendorongnya seperti komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, persamaan tujuan dalam menyejahterakan masyarakat, peran aktif masyarakat dan tokoh desa. **Kesimpulan:** Relasi BPD dengan Pemerintah Desa di Desa Tenaru terbangun dalam semangat kemitraan. Kedua lembaga ini saling memberikan dukungan dengan saling melengkapi satu sama lain, dimana BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra dalam forum dialog terbuka secara aktif pada pembangunan desa. Pemerintah Desa juga menunjukkan sikap keterbukaan terhadap segala bentuk masukan dan kritik, sehingga menciptakan suasana kerja yang penuh dengan rasa saling percaya.

Kata kunci: Relasi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa sebagai representasi masyarakat yang berperan penting dalam membentuk arah kebijakan lokal. Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD tidak hanya memiliki kewenangan dalam menyetujui dan merumuskan Peraturan Desa bersama kepala desa, tetapi juga menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan warga desa (Sumantri, 2011). Peran ini menjadikan BPD sebagai kanal utama dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menjadikannya dasar pertimbangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks pembangunan yang berbasis partisipasi, aspirasi warga menjadi kompas penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya berlangsung, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan (Dwiyanto, 2003). BPD melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa menggunakan metode *Monitoring* dan *Evaluasi*. Metode tersebut dilaksanakan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, memastikan bahwa pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan asas-asas yang berlaku, dan mampu memberikan solusi dalam penemuan permasalahan (Resmayanti, 2020).

Pemerintah desa adalah pihak penyelenggara pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini memungkinkan pemerintah desa untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan, usulan, serta ide-ide dari warga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pembangunan desa, dan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal dengan cara mengoptimalkan fungsi pemerintah desa beserta dengan lembaga-lembaga ditingkat desa. Hal ini sehubungan dengan tugas dan fungsi BPD yang sangat relevan dalam mengupayakan terhadap realisasi dari usulan masyarakat setempat (Wianta, 2022).

Relasi antara BPD dan Pemerintah Desa sejatinya mencerminkan konsep collaborative governance, di mana aktor-aktor lokal saling berinteraksi dalam wadah institusional untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang responsif. Seperti dikemukakan Ansell dan Gash (2008), kolaborasi antara institusi formal dan masyarakat dalam pengambilan keputusan mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan lokal. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin melalui forum musyawarah desa sebagai arena deliberatif antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Kualitas deliberasi publik yang baik memungkinkan tercapainya konsensus dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Fung, 2015). Lebih lanjut, keberhasilan kolaborasi antara lembaga desa sangat dipengaruhi oleh unsur kepercayaan, keterbukaan informasi, dan komunikasi yang terus-menerus. Penelitian oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menyatakan bahwa keberlanjutan kolaborasi dalam tata kelola lokal bergantung pada shared motivation dan joint capacity, yakni adanya visi bersama dan kapasitas institusional yang saling mendukung. Dalam hal ini, koordinasi yang terjalin antara BPD dan Pemdes di Desa Tenaru menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara sinergis.

Selain itu, relasi antara BPD dan Pemerintah Desa telah diatur dalam regulasi nasional, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi, serta ikut merumuskan kebijakan desa bersama kepala desa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Tenaru, perencanaan pembangunan diarahkan pada keterlibatan semua elemen masyarakat melalui forum musyawarah desa. RPJMDes tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang bersifat tahunan dan menjadi pedoman pelaksanaan program. Dengan fondasi hubungan kemitraan yang kuat antara BPD dan Pemdes, pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Relasi badan permusyawaratan desa (BPD) dengan pemerintah desa telah ditetapkan dalam kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu lembaga pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan saling mendukung untuk mengatur tata kelola desa, dalam hal ini pada pembangunan desa. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Tenaru. Lebih lanjut, RPJMDes dilakukan perincian melalui program-program yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), yang disusun untuk jangka waktu satu tahun anggaran sebagai langkah operasional guna merealisasikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Suryadi (2019), keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara BPD dan pemerintah desa, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, Hartono (2020) menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD dan perangkat desa dapat memperkuat peran mereka dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara umum dapat kita lihat bahwa BPD dan Pemerintah Desa Tenaru sudah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal pada bidang pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas pembangunan desa, pemerintah desa harus mampu menumbuhkan komunikasi yang baik dengan mitra kerjanya dalam hal pemahaman atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Zahara, 2018).

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap RPJMDes Desa Tenaru, terlihat bahwa beberapa program pembangunan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Keberhasilan ini merepresentasikan upaya nyata dari pemerintah desa dalam mewujudkan program pembangunan desa yang telah dirancang. Di sisi lain, terdapat juga program pembangunan yang belum terlaksana, bahkan tahun pelaksanaan pembangunannya yang telah dijadwalkan sudah terlewati. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan dan tantangan dalam proses implementasinya. Sejauh ini koordinasi antar BPD dengan pemerintah desa di Desa Tenaru berjalan cukup baik. Namun terdapat kekurangan yang ditemukan dilihat dari realisasi program pembangunan yang tidak sesuai dengan rancangan RPJMDes yang telah disusun dalam musrenbang desa. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan BPD dengan pemerintah desa terjebak dalam perbedaan dan pertentangan sehingga mengarah pada munculnya konflik.

Persoalan terkait dengan sinkronisasi hubungan dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa agar terselenggara pembangunan yang baik. Untuk itu dalam kajian ini dilakukan penelitian yang mendalam tentang relasi antara BPD dengan pemerintah desa di Desa Tenaru. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa BPD dan pemerintah Desa Tenaru belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Relasi Badan Pemerintahan Desa (BPD) Dengan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks relasi antara BPD dengan pemerintah Desa dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan beragam pola relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan dinamika kelembagaan. Leton (2023) dalam penelitiannya di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores, mengungkapkan bahwa relasi antara BPD dan Pemerintah Desa bersifat konfliktual. Berdasarkan teori relasi dari Sutoro Eko (2019:169), ditemukan adanya pembentukan dua kubu di desa tersebut—yakni kubu BPD dan kubu Pemerintah Desa—yang memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis dan cenderung memicu konflik internal (Leton, 2023). Sebaliknya, penelitian Prihambodo (2019) di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa relasi antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan. Dengan menggunakan teori kelembagaan dari Huntington (2003), penelitian ini menekankan adanya hubungan saling mendukung, khususnya dalam implementasi dana desa, yang juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Prihambodo, 2019). Febrianingrum (2018) memberikan perspektif yang lebih komparatif melalui studi di tiga desa di Kabupaten Malang. Dengan menggabungkan teori kelembagaan dan teori kebijakan publik, ia menemukan bahwa pola relasi antar kelembagaan desa sangat bervariasi: Desa Sitarjo memiliki pola konfliktual, Desa Ngadas berpola dominatif, dan Desa Toyomarto menunjukkan pola kemitraan (Febrianingrum, 2018). Temuan ini mempertegas bahwa relasi antar lembaga desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan karakteristik kepemimpinan lokal. Dalam konteks hubungan antar lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten, Susanti (2020) meneliti relasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD dalam pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro. Melalui pendekatan teori kelembagaan dari David E. Apter (1997), penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika relasi tersebut mencerminkan implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi ruang bagi checks and balances antar lembaga (Susanti, 2020). Sementara itu, Santoso (2016) meneliti relasi antar kelembagaan desa di

Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Berdasarkan teori relasi dari Astuti (2012:98), ia menyimpulkan bahwa lemahnya kerjasama antar lembaga desa menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut adalah rendahnya kapasitas aparatur desa, pengelolaan dana desa yang tidak maksimal, dan kurangnya partisipasi masyarakat (Santoso, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun gap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu, perbedaan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap relasi antar lembaga pemerintah. Pada penelitian oleh Prihambodo (2019) dan Febrianingrum (2018) menggunakan teori kelembagaan menurut Huntington (2003). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melalui pendekatan teori relasi sebagaimana dikemukakan oleh Sutoro Eko dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia* (2014:169). Teori ini memandang relasi sebagai suatu bentuk interaksi kekuasaan yang dapat menciptakan pola kemitraan, dominasi, atau konflik, tergantung pada dinamika kekuasaan dan partisipasi dalam desa. Dari keseluruhan studi terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi antara BPD dan Pemerintah Desa tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kondisi lokal, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini akan memperkaya literatur dengan mengkaji pola relasi tersebut di Desa Tenaru serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kerja sama dalam konteks pembangunan desa.

1.5. Tujuan.

Mendeskripsikan fakta di lapangan terkait bentuk relasi dan faktor pendorong terbentuknya relasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Tenaru dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena seluruh data yang diperoleh dianalisis berdasarkan hasil wawancara tatap muka. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dengan menggambarkan informasi menggunakan bahasa dan kata-kata, mengambil konteks alamiah, dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari kepala Desa, Ketua BPD, sekretaris desa, kasi pembangunan, kasi keuangan, tokoh masyarakat masing-masing 1 orang, dan masyarakat (sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis dinamika hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam konteks pembangunan di Desa Tenaru, penulis menggunakan kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Eko Sutoro. Menurut Sutoro (2007), secara empiris terdapat empat pola relasi yang dapat menggambarkan hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa, yakni pola dominatif, kolusif, konflikktual, dan kemitraan. Keempat pola ini mencerminkan beragam kemungkinan hubungan yang dapat terbentuk dalam tata kelola pemerintahan desa, tergantung pada

konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat desa tersebut.

Pola dominatif menggambarkan hubungan yang timpang, di mana salah satu pihak—baik BPD maupun Pemerintah Desa—memiliki kekuasaan yang dominan dan cenderung mengabaikan peran atau kontribusi pihak lainnya. Dalam konteks ini, demokrasi desa menjadi lemah karena keputusan-keputusan strategis tidak melibatkan mekanisme check and balance yang sehat. Sementara itu, pola kolusif menampilkan kerja sama yang tampak harmonis di permukaan, namun sering kali menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, pola konfliktual mencerminkan relasi yang diwarnai oleh ketegangan dan perbedaan pandangan yang tajam antara BPD dan Pemerintah Desa. Walaupun konflik bukan hal yang sepenuhnya negatif, jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses pembangunan dan memecah belah masyarakat. Namun, apabila konflik dimaknai sebagai perbedaan yang produktif dan diselesaikan melalui dialog terbuka, maka justru bisa menjadi pendorong perbaikan tata kelola desa.

Pola yang ideal menurut Sutoro adalah pola kemitraan, di mana BPD dan Pemerintah Desa saling menghargai peran masing-masing, menjalin komunikasi yang setara, dan bersama-sama menjalankan pembangunan desa yang inklusif. Dalam pola ini, kedua lembaga menjadi mitra sejajar yang bekerja berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, keempat pola tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam pada subbab berikutnya untuk memahami sejauh mana relasi BPD dan Pemerintah Desa di Desa Tenaru mencerminkan karakteristik masing-masing pola.

3.1. Relasi Dominatif

Penulis melakukan pengukuran terhadap relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam konteks pembangunan desa melalui tiga indikator utama, yaitu pelaksanaan musyawarah, proses penentuan kebijakan, dan pemahaman terhadap tugas serta fungsi kelembagaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Desa Tenaru—mulai dari Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat desa, hingga masyarakat—dapat disimpulkan bahwa praktik tata kelola desa menunjukkan dinamika yang cukup baik dan demokratis. Musyawarah desa dilaksanakan secara sistematis dan menyertakan representasi dari berbagai unsur masyarakat. Tidak hanya tokoh masyarakat dan perangkat RT/RW yang terlibat, tetapi juga kalangan pemuda, perempuan, serta tokoh agama. Hal ini menegaskan adanya komitmen untuk menjadikan musyawarah desa sebagai ruang bersama yang inklusif dan berorientasi pada kolaborasi antarwarga.

Musyawarah desa di Desa Tenaru tidak hanya dijadikan sebagai forum penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai medium untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berakar dari kebutuhan riil masyarakat. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang dan terbuka, di mana inisiatif teknis biasanya berasal dari Pemerintah Desa, tetapi tetap harus mendapat legitimasi melalui persetujuan bersama dengan BPD dan unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut menjadi cermin dari proses demokrasi deliberatif di tingkat lokal yang menolak dominasi satu pihak. Keputusan yang dihasilkan pun mencerminkan kehendak kolektif, bukan kehendak segelintir elit, dan ini sangat penting dalam mendorong rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Dalam praktiknya, relasi antara BPD dan Pemerintah Desa tampak harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Pemerintah Desa tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga terbuka terhadap fungsi pengawasan dan representasi masyarakat yang diemban oleh BPD. Di sisi lain, BPD pun menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang partisipatif dan tidak konfrontatif. Ketika terjadi perbedaan pandangan, penyelesaiannya dilakukan melalui komunikasi yang intens dan dialog yang bersifat membangun. Relasi ini memperlihatkan adanya pembagian peran yang sehat antara dua lembaga desa, dengan satu sama lain saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesadaran terhadap peran kelembagaan juga semakin tumbuh di antara para pelaku pemerintahan desa. Pemerintah Desa mulai memperkuat tanggung jawabnya dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan, sementara BPD semakin aktif dalam menyalurkan aspirasi warga dan memastikan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diambil. Meski di masa lalu sempat terdapat keterbatasan dalam pelibatan BPD sejak tahap awal perencanaan, saat ini kedua belah pihak telah menunjukkan langkah-langkah perbaikan yang nyata. Komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif menjadi fondasi dalam memperkuat sinergi.

3.2. Relasi Kolusif

Penulis melakukan pengukuran terhadap pola relasi kolusif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa melalui dua aspek penting: pelayanan kepada masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Tenaru, terlihat bahwa pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah Desa berlangsung cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara Pemerintah Desa sebagai pelaksana teknis dan BPD sebagai lembaga pengawasan yang mewakili aspirasi masyarakat. Kedua lembaga tersebut saling melengkapi peran masing-masing dalam menjaga mutu pelayanan serta memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara tepat.

Dalam praktiknya, BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan aparatur desa. Peran ini sangat penting dalam menciptakan kedekatan sosial dan psikologis yang membuat masyarakat merasa lebih nyaman menyampaikan keluhan, usulan, atau kebutuhan mereka secara langsung. Keterlibatan BPD dalam menyuarkan aspirasi warga membantu membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pelayanan. Model hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa kerja sama antar lembaga desa mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Namun demikian, ketika ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bersama. Meskipun masyarakat telah menunjukkan antusiasme dalam tahap pelaksanaan, seperti kegiatan kerja bakti atau pembangunan fisik, partisipasi mereka dalam tahap perencanaan dan evaluasi masih belum menyentuh seluruh lapisan sosial secara merata. Proses perencanaan kebijakan masih cenderung didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar, sementara sebagian warga lainnya belum sepenuhnya memahami mekanisme pembangunan desa. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program pembangunan dan informasi yang belum terdistribusi secara merata di tingkat masyarakat bawah.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih terbuka, inklusif, dan menyeluruh dari Pemerintah Desa dan BPD. Sosialisasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, forum-forum diskusi publik yang bersifat partisipatif dapat menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi warga sejak tahap perencanaan. Dengan memperkuat transparansi informasi dan memperluas ruang partisipasi, maka proses pembangunan di Desa Tenaru akan semakin demokratis, adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3.3. Relasi Konflikual

Penulis melakukan pengukuran terhadap pola konflikual antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui dua indikator utama, yaitu persepsi terhadap hasil keputusan musyawarah dan pelaksanaan implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa

Tenaru menunjukkan bahwa dinamika musyawarah desa sering kali melibatkan perbedaan pandangan, terutama dalam penetapan skala prioritas pembangunan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketegangan yang meruncing, melainkan dipahami sebagai bagian dari proses demokratis yang sehat. Dalam konteks ini, perbedaan persepsi menjadi elemen penting dalam menyaring berbagai aspirasi warga demi menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan berimbang.

Musyawarah desa di Tenaru tidak diperlakukan sekadar sebagai ritual administratif, melainkan dimaknai sebagai arena deliberatif yang memungkinkan dialog antar-aktor desa berjalan secara jujur dan terbuka. Baik BPD maupun Pemerintah Desa menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjaga suasana diskusi yang kondusif, dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Hal ini menciptakan atmosfer kemitraan yang saling menghargai, di mana kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama. Dengan begitu, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi cermin dari nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menjunjung tinggi gotong royong dan kekeluargaan.

Dalam aspek implementasi kebijakan, Desa Tenaru memperlihatkan upaya kolektif yang solid dari seluruh elemen pemerintahan desa dan masyarakat. Kesepakatan yang telah dirumuskan melalui musyawarah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, meskipun dalam praktiknya seringkali menemui kendala seperti keterbatasan anggaran, cuaca ekstrem, atau hambatan logistik lainnya. Kendati demikian, hambatan teknis ini tidak lantas memunculkan konflik horizontal karena Pemerintah Desa dan BPD secara aktif menjaga komunikasi dengan warga, menyampaikan informasi secara terbuka, dan berusaha menciptakan solusi bersama. Transparansi menjadi kunci penting dalam memelihara kepercayaan dan mencegah berkembangnya persepsi negatif dari masyarakat.

Lebih lanjut, pengawasan yang dilakukan oleh BPD serta partisipasi aktif dari warga dalam pelaksanaan program pembangunan menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kebijakan bersifat kolektif, bukan hanya milik elit desa. Pola hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa di Tenaru telah membangun fondasi yang kokoh dalam prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Dengan adanya relasi yang berbasis pada rasa saling percaya, keterbukaan, dan kesetaraan dalam menjalankan pemerintahan, potensi konflik dapat dikelola secara preventif dan disublimasikan menjadi energi positif untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.4. Relasi Kemitraan

Pengukuran terhadap pola kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Tenaru menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu koordinasi dan komunikasi aktif, penerapan prinsip check and balance, serta pengambilan keputusan pembangunan secara demokratis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hubungan antar kedua lembaga ini dibangun di atas semangat kolaboratif yang kuat. Tidak hanya berlangsung dalam forum-forum resmi seperti musyawarah desa, kemitraan tersebut juga dipelihara melalui interaksi informal yang memanusiaikan proses kerja sama. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka, jujur, dan responsif menjadi kunci dalam menciptakan sinergi dan menghindari potensi konflik yang dapat merugikan masyarakat. Hubungan ini memperlihatkan pola interaksi yang dinamis dan adaptif. BPD dan Pemdes tidak terjebak dalam sekat-sekat struktural yang kaku, melainkan saling melengkapi peran dan fungsinya sesuai amanah undang-undang. BPD memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat yang menyampaikan dan mengawal aspirasi warga, sedangkan Pemdes menjadi pelaksana kebijakan sekaligus motor penggerak pembangunan. Dalam praktiknya, dialog yang dibangun bersifat deliberatif, di mana forum musyawarah tidak hanya menjadi ajang tukar pendapat, tetapi juga tempat menempa

kesepahaman atas arah kebijakan yang hendak diambil bersama.

Salah satu ciri menonjol dalam kemitraan ini adalah penerapan prinsip check and balance secara sehat dan konstruktif. BPD menjalankan fungsi kontrolnya tidak dengan pendekatan konfrontatif, melainkan dengan semangat membangun. Kritik disampaikan dalam bentuk masukan yang argumentatif dan bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa. Di sisi lain, Pemdes menunjukkan keterbukaan yang besar terhadap evaluasi, bahkan secara aktif mengundang peran BPD dalam menilai dan memperkuat keputusan yang diambil. Hal ini mencerminkan adanya kematangan kelembagaan dan etika pemerintahan yang berkembang positif di tingkat lokal. Praktik komunikasi antara BPD dan Pemerintah desa pun berlangsung dalam atmosfer yang inklusif dan saling menghargai. Perbedaan pendapat dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sebagai hambatan. Ruang-ruang diskusi digunakan untuk menyamakan persepsi dan menjembatani kebutuhan masyarakat yang majemuk. Bahkan dalam kondisi tertentu, komunikasi informal seperti diskusi santai antar tokoh desa menjadi strategi efektif dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi kompromi yang lebih bijak. Pendekatan ini menegaskan pentingnya nilai-nilai humanisme dan empati dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang responsif.

Pengambilan keputusan dalam pembangunan desa di Tenaru pun berlangsung secara demokratis dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai elemen, mulai dari unsur formal pemerintahan desa hingga representasi masyarakat sipil seperti tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan warga biasa. Aspirasi dari berbagai kelompok ini dihimpun secara terbuka dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua keinginan masyarakat dapat langsung terwujud karena keterbatasan sumber daya, namun mekanisme pelibatan mereka dalam proses musyawarah telah memperkuat legitimasi keputusan yang diambil dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Keberhasilan dalam menerapkan pola kemitraan ini juga tidak lepas dari penguatan kapasitas kelembagaan dan personal kedua belah pihak. Baik aparatur Pemdes maupun anggota BPD menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap tugas, fungsi, dan batas kewenangannya. Kesadaran inilah yang menjadi landasan dalam membangun relasi kerja yang sejajar dan bersifat kolegial. Ketika peran dan fungsi dijalankan secara proporsional, maka potensi konflik dapat dikelola dengan lebih baik dan pembangunan pun dapat diarahkan secara lebih terukur dan akuntabel.

Dengan demikian, pola kemitraan yang terbentuk antara BPD dan Pemdes di Desa Tenaru menjadi contoh praktik demokrasi lokal yang menjanjikan. Relasi yang dibangun tidak semata-mata atas dasar formalitas hukum, tetapi juga ditopang oleh komitmen bersama dalam membangun desa secara inklusif, transparan, dan partisipatif. Pola ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang baik tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kesetaraan relasi, serta semangat kolektivitas yang terus dipelihara oleh semua pemangku kepentingan desa.

3.5. Faktor Pendorong Terciptanya Relasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Tenaru Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tenaru

Hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di Desa Tenaru tidak dapat dilepaskan dari praktik komunikasi dan koordinasi yang berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Kedua lembaga ini secara rutin menjalin komunikasi melalui musyawarah desa sebagai forum resmi, maupun melalui interaksi informal yang lebih fleksibel dan personal. Bentuk komunikasi yang beragam ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang cepat, pengambilan keputusan yang efisien, serta penciptaan suasana kerja yang kolaboratif. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar alat tukar informasi administratif, melainkan menjadi fondasi dalam membangun

kepercayaan dan solidaritas antar lembaga.

Koordinasi yang dilakukan pun tidak bersifat satu arah. Baik BPD maupun Pemerintah Desa menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati peran masing-masing. Ketika BPD menyampaikan kritik atau masukan, Pemerintah Desa menanggapinya sebagai bagian dari proses pengawasan yang sehat. Sebaliknya, ketika Pemerintah Desa memerlukan dukungan dalam menjelaskan program kepada masyarakat, BPD turut menjadi corong informasi yang menjembatani pemahaman warga. Relasi ini membentuk pola kerja yang sinergis, di mana perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi justru dijadikan sebagai bahan refleksi dan perbaikan kebijakan desa.

Selain itu, kesamaan visi antara kedua lembaga menjadi energi pemersatu yang memperkuat kemitraan mereka. Baik BPD maupun Pemerintah Desa memiliki orientasi yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Keselarasan tujuan ini memudahkan proses kolaborasi dalam menyusun agenda pembangunan, menyusun prioritas kebijakan, dan menindaklanjuti kebutuhan warga. Bahkan dalam forum musyawarah desa, kehadiran aktif dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan unsur lainnya turut mengokohkan nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam membangun desa.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat yang tinggi juga menjadi faktor pendorong utama terjalannya relasi yang harmonis. Ketika warga menunjukkan kepedulian melalui kehadiran di forum-forum musyawarah dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, hal itu memberikan tekanan moral yang positif bagi kedua lembaga untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja mereka. Partisipasi warga bukan hanya memperkaya substansi musyawarah, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dalam konteks ini, keharmonisan antara BPD dan Pemerintah Desa bukan semata hasil kebijakan birokratis, tetapi juga merupakan cermin dari budaya demokrasi lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa Tenaru.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, temuan utama dalam studi mengenai relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Tenaru menunjukkan bahwa pola hubungan yang terbangun secara dominan mengarah pada pola kemitraan. Relasi ini dicirikan oleh komunikasi yang aktif dan terbuka, baik dalam forum formal maupun informal, serta koordinasi yang terstruktur antara kedua lembaga. BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah Desa menunjukkan sikap inklusif dengan menerima masukan dan kritik secara konstruktif, sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.

Meski demikian, temuan lain juga mengindikasikan adanya dinamika relasi yang sesekali mengarah pada pola kolusif dan konfliktual, terutama dalam hal keterbatasan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, atau perbedaan pendapat dalam penentuan prioritas pembangunan. Namun dinamika ini tidak berkembang menjadi konflik, karena keduanya tetap menjaga prinsip musyawarah mufakat. Faktor-faktor utama yang mendorong terbentuknya relasi kemitraan ini meliputi komunikasi dan koordinasi yang konsisten, kesamaan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, serta peran aktif masyarakat dan tokoh desa dalam forum-forum pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemerintahan desa di Tenaru menunjukkan perkembangan ke arah tata kelola yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Tenaru terjalin dalam semangat kemitraan yang saling mendukung. Kedua lembaga tidak hanya menjalankan perannya masing-masing, tetapi juga saling melengkapi. BPD tidak sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga aktif berperan sebagai mitra dialog dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah Desa pun terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun, sehingga tercipta suasana kerja yang dilandasi rasa saling percaya. Hubungan ini menjadi landasan penting bagi terciptanya tata kelola pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Meskipun hasil musyawarah desa telah menghasilkan rencana pembangunan bersama, dalam pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada hambatan teknis, seperti keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah tingkat atas atau kondisi cuaca yang kurang mendukung. Kendala tersebut menyebabkan jadwal pelaksanaan perlu disesuaikan, namun tidak menghalangi komitmen Pemerintah Desa untuk tetap merealisasikannya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, komunikasi terbuka dan koordinasi yang intensif antara Pemdes dan BPD menjadi kunci utama penyelesaian masalah. Relasi yang terbangun ini diperkuat oleh tiga faktor penting, yakni: komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, kesamaan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, serta peran aktif masyarakat dan tokoh desa dalam proses pembangunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan relasi BPD dengan Pemerintah Desa di desa Tenaru Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Tenaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 55. doi:<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i55.213>
- Wianta, I. M. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 82-87. doi:<https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.82-87>
- Dwiyanto, A. (2003). *Konflik di Era Otonomi Daerah dalam "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSSK-UGM.
- Sumantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Satu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif*. Bandung: Fokus Media.

- Resmayanti, J. d. (2020). FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 522-523
- Eko Sutoro, D. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa(FPPD).
- Leton, A. Y. L. (2023). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores.
- Prihambodo, O. G. P. (2019). Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Febrianingrum, D. S. (2018). Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Dana Desa Kabupaten Malang.
- Susanti, A. (2020). Relasi Pemerintah Kabupaten Gresik Dan DPRD Kabupaten Gresik Pada Pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro.
- Santoso, R. (2016). Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016.
- UNDP. (2016). *Village Governance and Development: Best Practices from Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.
- Maulida, N. & Darmawan, D. (2021). Kolaborasi BPD dan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa*, 4(1), 20–32.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Hartono, B. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45-58.
- Suryadi, T. (2019). Sinergi BPD dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 89-102.